

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan global menuntut negara-negara di dunia termasuk di Indonesia untuk melakukan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di suatu negara. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat menjadikan perekonomian nasional menjadi stabil serta terus meningkat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat serta agar dapat menekan tingkat pengangguran.

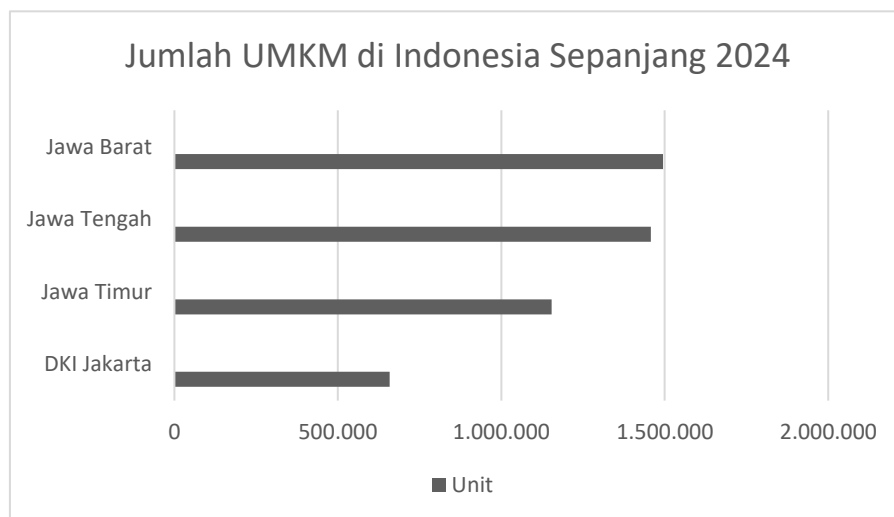
Pemerintah melakukan upaya dalam menstabilkan dan meningkatkan perekonomian nasional maupun daerah salah satunya yaitu dengan menekankan peran serta potensi pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut peraturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kegiatan UMKM disebutkan bahwa UMKM merupakan suatu usaha atau aktivitas produktif yang dapat dimiliki oleh pihak perorangan atau suatu badan usaha yang mana sesuai dalam pemenuhan kriteria pada usaha mikro dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

UMKM menjadi sumber penting pada pertumbuhan pendapatan daerah dan negara, memberikan peluang pada kesempatan kerja bagi masyarakat menengah ke bawah serta sebagai suatu upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Kegiatan UMKM merupakan salah satu wadah dalam bidang usaha guna menciptakan lapangan pekerjaan produktif yang bersifat padat karya dengan persyaratan yang

sederhana karena tidak terikat dengan keahlian atau keterampilan pekerja, tingkat pendidikan, serta relatif sedikitnya dalam menggunakan modal usaha (Rinaldi, 2018).

Dalam perkembangannya, UMKM di Indonesia berkontribusi atas penyerapan tenaga kerja, jumlah unit usaha serta pengusaha. UMKM sendiri memberikan andil dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2011 dengan jumlah sebesar 57,60 persen dari total PDB nasional. UMKM juga menjangkau target sebesar 55,21 juta unit dengan total tenaga kerja sebesar 101,72 juta orang pada tahun 2011 (B. P. P. Nasional, 2014). Hingga pada tahun 2018, UMKM mempunyai andil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,1 persen dengan total tenaga kerja UMKM sebanyak 117 juta pekerja (Nainggolan, 2020).

Gambar 1.1. Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang Tahun 2024



Sumber : UKMIndonesia.id

Tahun 2024, pemerintah mendata secara nasional unit UMKM tertinggi di Indonesia diduduki oleh Provinsi Jawa Barat dengan total 1.494.723 unit, kemudian

nomor dua disusul dengan Provinsi Jawa Tengah dengan total 1.457.126 unit UMKM. Kemudian diikuti Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Di balik tingginya jumlah tersebut, masih ditemui banyaknya pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, yang belum mampu untuk berkembang ke level usaha kecil atau menengah. Permasalahan seperti keterbatasan akses pemasaran, informasi, pembiayaan, perizinan hingga literasi digital menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha. Permasalahan ini juga terjadi di Kabupaten Kendal.

Kabupaten Kendal memiliki jumlah pelaku UMKM sebanyak 18.903 unit, yang mana sebanyak 18.582 di antaranya merupakan usaha mikro. Dominasi usaha mikro ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih berada pada tahap awal dan belum mampu naik kelas. *Tagline* “UMKM Naik Kelas” yang diusung oleh pemerintah menjadi gambaran visi dan strategi untuk mendorong para pelaku usaha mikro agar mampu meningkatkan kapasitas usahanya.

Tabel 1.1. Jumlah UMKM di Kabupaten Kendal per-2024

No.	Kategori	2022	2023	2024
1.	Usaha Mikro	17.945	18.312	18.582
2.	Usaha Kecil	290	307	321
	Total	18.235	18.619	18.903

Sumber : Satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id

Berdasarkan data dari Satudata Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten

Kendal mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, total UMKM tercatat sebanyak 18.235 unit, yang terdiri dari 17.945 usaha mikro dan 290 usaha kecil. Jumlah ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 18.619 unit, dengan 18.312 usaha mikro dan 307 usaha kecil. Kemudian, pada tahun 2024, total UMKM tercatat sebanyak 18.903 unit, yang terdiri atas 18.582 usaha mikro dan 321 usaha kecil.

Peningkatan jumlah UMKM dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pertumbuhan kuantitatif sektor usaha rakyat di Kabupaten Kendal. Namun demikian, secara persentase, proporsi usaha mikro masih mendominasi secara signifikan, yaitu mencapai 98,3% dari total UMKM pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kendal masih berada pada skala mikro, yang umumnya menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses terhadap legalitas, permodalan, dan teknologi.

Studi pendahuluan dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal serta Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM Kendal didapatkan informasi bahwa kondisi kelas UMKM di Kabupaten Kendal sendiri di dominasi oleh UMKM skala mikro sebesar 98,3 persen dari total 18.903 unit yang mana sebagian besar pelaku usaha di Kendal merupakan usaha mikro dengan keterbatasan dalam hal modal, akses pasar, teknologi dan manajemen. Selain itu masih ditemui pelaku usaha yang belum banyak yang terdata. Hal tersebut ditunjukkan dengan sekitar 40 persen pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT (Pangan Industri Rumah

Tangga), atau sertifikasi halal. Rendahnya akses terhadap teknologi dan digitalisasi juga menjadi permasalahan yang masih dihadapi pada UMKM di Kendal. Kendala terhadap akses pelatihan *digital marketing*, penggunaan *e-commerce*, atau sistem pembayaran digital yang masih kurang dimanfaatkan secara optimal. Kemudian, adanya keterbatasan akses permodalan dan perbankan, yaitu masih banyaknya pelaku UMKM yang belum mampu memenuhi syarat administratif untuk mengakses pembiayaan formal seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) karena belum memiliki pembukuan atau legalitas usaha. Kondisi ini menyebabkan hambatan dalam pengembangan usaha mereka. Berdasarkan data capaian layanan PLUT Kendal selama periode 2022 hingga 2024, jumlah UMKM yang terlayani mengalami fluktuasi dengan penurunan signifikan dari 2.752 UMKM pada 2022 menjadi 793 UMKM pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa cakupan layanan PLUT masih perlu diperluas dan ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Kendal (Satudata Dinkop-UMKM Jateng, 2025).

Tagline “UMKM Naik Kelas” yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Kendal mencerminkan upaya sistematis dalam meningkatkan kapasitas pada pelaku usaha mikro agar berkembang menjadi usaha kecil dan menengah yang berdayasaing. Hal ini didasarkan pada kondisi objektif di mana sebagian besar UMKM di Kendal masih berada pada kategori usaha mikro dengan keterbatasan dalam aspek legalitas, permodalan, teknologi dan pemasaran. Oleh karena itu, melalui program pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi dari PLUT-KUMKM, pemerintah daerah

mendorong transformasi UMKM lokal agar lebih mandiri, inovatif, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Sebagai bentuk respon terhadap tantangan tersebut dan diharapkan dapat menjadi solusi untuk dapat mendorong para pelaku usaha mikro agar mampu naik kelas, pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM menurunkan program Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM. PLUT merupakan salah satu program strategis dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan dan mendorong pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan. PLUT hadir sebagai wadah layanan non-finansial yang menyediakan pendampingan usaha, konsultasi bisnis, serta pelatihan manajerial dan teknis bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro. Dengan adanya pendampingan yang komprehensif dari PLUT, diharapkan pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan di tengah persaingan pasar, tetapi juga dapat berkembang menjadi usaha kecil yang mandiri, memiliki legalitas usaha, akses pembiayaan, serta daya saing di era digital.

Berdasarkan Peraturan Menteri KUKM Nomor 9 Tahun 2013, PLUT-KUMKM didirikan untuk menjadi pusat pelayanan yang komprehensif bagi UMKM melalui tenaga pendamping profesional (*business development services provider*). Melalui pendekatan ini, diharapkan UMKM mampu naik kelas, meningkatkan kapasitas usahanya, serta lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional.

PLUT memberikan pola pendampingan serta mengintegrasikan seluruh sumberdaya produktif agar dapat meningkatkan daya saing, produktivitas, nilai tambah, pemulihan suatu usaha, serta kualitas kerja para pelaku UMKM. PLUT-KUMKM menyediakan fasilitas pendampingan dalam lima bidang utama, yakni produksi, pembiayaan, sumber daya manusia, kelembagaan, dan pemasaran. Program tersebut merupakan program turunan dari Kementrian Koperasi dan UMKM serta merupakan solusi terhadap kebutuhan-kebutuhan pada program pendampingan UMKM di daerah.

Di Indonesia, PLUT telah tersebar sebanyak 84 lokasi dalam 32 provinsi. Dari ke-32 provinsi yang terdapat program PLUT, Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu yang memiliki lokasi PLUT terbanyak yaitu 11 lokasi yang mana tersebar di Kota Semarang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Solo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Kendal (C. Nasional, 2020).

Di Kabupaten Kendal, PLUT-KUMKM mulai beroperasi sejak tahun 2019, berada di bawah koordinasi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM setempat. PLUT-KUMKM Kendal memiliki lima bidang layanan, yakni produksi, pemasaran, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Setiap bidang ditangani oleh konsultan pendamping yang tersebar di lima kawedanan (Boja, Kaliwungu, Kendal, Weleri, dan Sukorejo). Program kerja PLUT di Kabupaten Kendal mencakup dari lima bidang tersebut dengan bentuk pelayanan antara lain

layanan konsultasi dan pendampingan, fasilitasi perijinan, halal, hak merek, desain dan kemasan, digitalisasi umkm, serta pintu ke-pintu.

Kabupaten Kendal memiliki lokasi strategis secara geografis dan demografis yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan. Selain dekat dengan Ibu Kota Jawa Tengah, Kabupaten Kendal memiliki wilayah yang bervariasi mulai dari bagian pantai hingga pegunungan sehingga produksi pada sumber daya alam yang dihasilkan berlimpah mulai dari sektor perikanan, pertanian, perkebunan hingga peternakan. Kabupaten Kendal memiliki mobilitas yang cukup tinggi menurut karakteristik demografi dengan hampir total tiga perempatnya adalah penduduk dengan usia produktif. Selain itu, Kabupaten Kendal juga mempunyai satu wilayah industri yang dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Jawa Tengah, sehingga Kabupaten Kendal menjadi lokasi yang sering disinggahi oleh banyak orang. Disamping itu, Kabupaten Kendal juga terletak di lokasi strategis yaitu berlokasi di jalur lintas pantura.

Program Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kabupaten Kendal menjadi fokus pemerintah Kabupaten Kendal sebagai upaya untuk mengembangkan UMKM terutama sektor usaha mikro yang mana sangat mendominasi di Kabupaten Kendal. Pelaksanaan program PLUT di Kabupaten Kendal terintegrasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal.

Berikut ini merupakan data capaian kerja PLUT-KUMKM Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

Tabel 1.2. Hasil Capaian Kinerja PLUT-KUMKM Kabupaten Kendal Tahun 2023

Kategori	2022	2023	2024
NIB	1.150	839	604
PIRT	148	-	39
Halal	72	-	91
Hak Merek	35	-	24
Pembiayaan	243	64	11
Pemasaran	1.030	147	-
Pelatihan	-	-	8
Sosialisasi	-	-	3
Lainnya (Event Bazar, Pendampingan Usahaaha, Konsultasi BPOM)	25	111	13
UMKM Terlayani	2.752	1.136	793

Sumber: Laporan Evaluasi PLUT Kendal

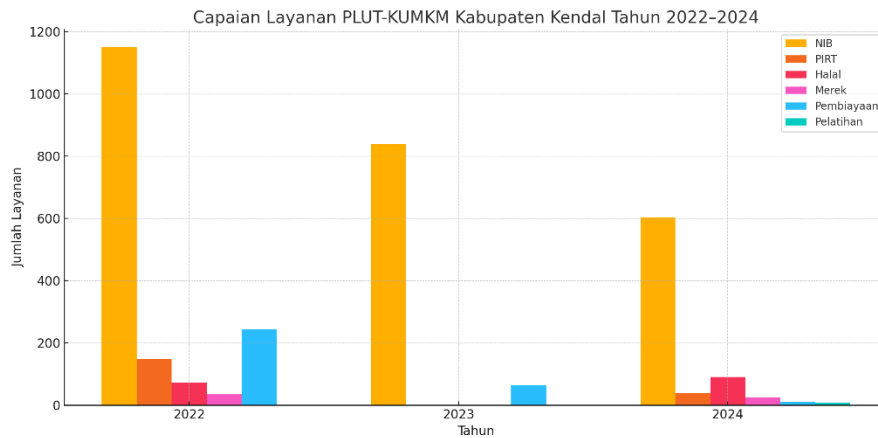
Data capaian kinerja PLUT-KUMKM Kabupaten Kendal tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya dinamika dalam penyelenggaraan layanan kepada pelaku usaha mikro. Pada tahun 2022, realisasi layanan terhadap UMKM mencapai angka tertinggi, yaitu 2.752 pelaku usaha yang terlayani, dengan penerbitan NIB mencapai 1.150 dan akses pemasaran sebanyak 1.030. Capaian ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut pendekatan PLUT masih berfokus pada kuantitas layanan.

Memasuki tahun 2023, jumlah UMKM yang terlayani mengalami penurunan menjadi 1.136 atau sekitar 41,3% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, capaian strategis seperti peningkatan omzet UMKM (sebanyak 111 pelaku usaha) menjadi indikator baru yang menunjukkan pergeseran pendekatan dari pelayanan masif menuju penguatan kualitas hasil layanan. Namun, beberapa indikator seperti akses pembiayaan dan pemasaran masih berada di bawah target ideal.

Pada tahun 2024, meskipun tidak tercantum jumlah total UMKM yang terlayani, fokus layanan terlihat lebih tematik dan mendalam. Capaian fasilitasi NIB mencapai 604, sertifikasi halal sebanyak 91, dan layanan PIRT sebanyak 39, menunjukkan perhatian PLUT terhadap legalitas usaha pelaku UMKM. Di sisi lain, pelatihan dan pendampingan juga mulai intensif dilakukan, seperti pelatihan kewirausahaan sebanyak 8 kegiatan dan monitoring usaha sebanyak 8 kegiatan. Namun, realisasi pembiayaan yang hanya menjangkau 11 pelaku usaha menjadi catatan penting bahwa akses terhadap modal masih menjadi tantangan utama.

Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa implementasi program PLUT-KUMKM di Kabupaten Kendal telah berjalan aktif dan mengalami evolusi pendekatan. Meski terdapat capaian positif dalam aspek legalitas dan pendampingan, beberapa indikator seperti pembiayaan dan pencapaian dampak ekonomi yang lebih luas masih memerlukan penguatan baik dari sisi strategi, sumber daya, maupun sinergi antar lembaga pendukung

Gambar 1.2. Grafik Layanan PLUT-KUMKM Kendal Tahun 2022-2024



Sumber : Diolah Peneliti

Gambar di atas menunjukkan tren capaian layanan PLUT-KUMKM Kabupaten Kendal selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, pencapaian layanan didominasi oleh penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 1.150 unit dan fasilitasi akses pembiayaan sebanyak 243 UMKM. Sementara itu, tahun 2023 mengalami penurunan di hampir semua kategori, termasuk NIB yang hanya mencapai 839 dan pembiayaan sebanyak 64 UMKM, tanpa adanya layanan PIRT, halal, atau pelatihan.

Tahun 2024 memperlihatkan pergeseran pendekatan program, di mana meskipun jumlah penerbitan NIB menurun menjadi 604, terdapat peningkatan layanan pada aspek legalitas lainnya seperti fasilitasi sertifikasi halal (91 layanan), pelatihan kewirausahaan (8 kegiatan), serta layanan PIRT dan merek dagang. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran dari pendekatan kuantitatif menuju

pendekatan tematik yang menekankan pada penguatan kapasitas dan legalitas pelaku usaha mikro.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Kusmawati (2024) dan Dewi (2019), implementasi program PLUT di daerah lain juga mengalami hambatan serupa, yaitu kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya komunikasi antarorganisasi. Mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi program sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, dan karakteristik pelaksana.

Berdasarkan penelitian dengan judul Implementasi Peran Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) Jawa Tengah dalam meningkatkan daya saing UMKM Banyumas oleh Dela Kusumawati tahun 2024 menunjukkan bahwa program PLUT belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh faktor kurangnya sosialisasi program serta sumber daya yang tersedia belum memadai. Pada penelitian lain dengan judul Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu oleh Tevi Ana Dewi tahun 2019 disebutkan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan kurang optimal karena dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya serta karakteristik badan pelaksana.

Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa implementasi program PLUT memerlukan komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, kejelasan ukuran dan tujuan program, kejelasan pada karakteristik

agen pelaksana dan disposisi. Diperlukan sumber daya manusia dan keuangan dan dukungan sosial, politik dan ekonomi. Menurut teori Van Meter dan Van Horn, implelementasi program akan berhasil atau berjalan optimal jika faktor-faktor tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu melihat pentingnya peran PLUT dalam pengembangan UMKM, perlu dilakukan kajian mengenai sejauh mana implementasi PLUT-KUMKM di Kabupaten Kendal dapat berjalan secara optimal.

Dilihat dari aspek uraian penjelasan yang telah dipaparkan di atas mengenai program Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait implementasi program tersebut dan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM bagi Usaha Mikro di Kabupaten Kendal”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Dominasi UMKM skala mikro dengan keterbatasan sumber daya
2. Rendahnya tingkat formalitas dan kepemilikan legalitas usaha
3. Keterbatasan akses terhadap teknologi dan digitalisasi.
4. Hambatan dalam akses pembiayaan formal.
5. Penurunan capaian layanan PLUT terhadap UMKM terlayani.
6. Tantangan internal dan eksternal dalam pelaksanaan PLUT.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat peneliti ambil yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk menganalisa implementasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan penelitian antara lain yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan tingkat pengetahuan serta keilmuan dalam lingkup akademisi dengan fokus ilmu administrasi publik, yang mana bermanfaat untuk mengembangkan studi mengenai administrasi publik serta berkaitan dengan suatu implementasi kebijakan. Kemudian diharapkan penelitian ini mampu memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis mengenai implementasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) terhadap usaha mikro serta permasalahan-permasalahan yang timbul.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Penulis

Adanya penelitian ini, bagi penulis diharapkan untuk dapat menerapkan disiplin ilmu yang mana telah didapat selama proses belajar di bangku kuliah Administrasi Publik serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal.

- b. Pemerintah Kabupaten Kendal

Adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan saran/masukan atau bantuan berupa gagasan bagi pihak yang terkait mengenai implementasi Pusat

Layanan Usaha Terpadu (PLUT) bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal serta permasalahan-permasalahan yang timbul.

c. Masyarakat

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat menyumbang alternatif pemikiran yang mana mampu untuk diterapkan sebagai bahan informasi sebagai pertimbangan yang menyangkut permasalahan serta sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Menurut Atmosudirjo (Pasolong, 2012), pendapat melalui pemikiran rasional atas dasar prosedur atau suatu proses tertentu disebut “prosedur ilmiah”. Kerangka teori disusun guna mendapatkan kerangka pikir yang mana merupakan suatu penjelasan sementara atas objek permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan.

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Tahun, Nama Peneliti	Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Temuan
	Internasional				
1	A Social Enterprise Approach to Empowering Micro, Small and Medium Enterprises	Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan pendekatan wirausaha sosial dalam upaya pemberdayaan	Studi ini menerapkan pendekatan metode kualitatif dengan studi kasus ganda, dengan menerapkan program Iptekda LIPI sebagai unit analisis	Hasil pemberdayaan antara kedua wilayah tersebut tidak lepas dari tahap persuasi yang telah disebutkan pada sub-bagian sebelumnya. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan wirausaha sosial mungkin berguna untuk memberdayakan UKM jika periode pelaksanaan program berlangsung beberapa tahun dan jika ada hierarki tujuan untuk setiap periode pelaksanaan. Selain itu, di

No.	Judul, Tahun, Nama Peneliti	Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Temuan
	(SMEs) in Indonesia. (2020). Irfan Ridwan M, Amy Yayuk S.R., dan Dhian Kusumawardhan i (Maksum et al., 2020) Pendekatan Kewirausahaan Sosial untuk Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan	Jurnal Inovasi Terbuka Teknologi, Pasar, dan Kompleksitas	pada usaha mikro.		karakteristik yang berbeda antara keduanya, beberapa wilayah geografis menyebabkan di berbagai strategi persuasi keputusan implementasi dan konfirmasi untuk peneliti lain untuk mengimplementasikan program serupa.

No.	Judul, Tahun, Nama Peneliti	Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Temuan
	Menengah (UKM) di Indonesia				
2	A Review of Contributing Factors and Challenges in Implementing Kaizen in Small and Medium Enterprises. (Maarof & Mahmud, 2016) Tinjauan Faktor- faktor yang Berkontribusi	Jurnal Manajemen Bisnis dan Ekonomi	Akan memberikan beberapa wawasan tentang faktor apa saja yang ikut andil terhadap suatu keberhasilan implementasi Kaizen dan tantangannya.	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian memperlihatkan mengenai faktor dalam komunikasi dengan manajemen puncak serta karyawannya, berbagai strategi yang jelas, kebutuhan pada personel yang mampu untuk memperjuangkan penerapan Kaizen di sebuah perusahaan, mempunyai pengetahuan yang baik serta memberikan karyawan-karyawannya upaya tingkat pemberdayaan tertentu yang mana cukup penting untuk memastikan pelaksanaan Kaizen yang sukses. Di sisi lain, kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam mengimplementasikan Kaizen meliputi faktor apa saja, anatara lain kurangnya keahlian untuk dapat mengelola pembaruan terus menerus itu sendiri, resistensi pada perubahan serta

No.	Judul, Tahun, Nama Peneliti	Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Temuan
	dan Tantangan dalam Pelaksanaan Kaizen di Usaha Kecil dan Menengah				kurangnya dalam motivasi di kalangan pegawai dikarenakan adanya sistem bentuk penghargaan yang masih buruk.
	Nasional				
3	Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang (2018).	Jurnal Ilmu Administrasi Publik	Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui mengenai pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan	Penelitian ini yaitu penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi dan	Hasil penelitian : Pertama, dalam pelaksanaan pembinaan oleh Dinas Koperasi serta UMKM dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan dari sisi sumber daya manusia(SDM) terdapat masalah yaitu minimnya atau kurang pada jumlah tenaga kerja profesional yang mana SDM tersebut dibutuhkan sebagai membantu jalannya pembinaan bagi pelaku usaha. Ditemukan fakta

No.	Judul, Tahun, Nama Peneliti	Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Temuan
	Florita Aina, Jumiati, & Adil Mubarak, 2018		UMKM, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu pembinaan, serta usaha yang dijalankan guna mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMK Kota Padang.	UMKM Kota Padang. Informan pada penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling yaitu suatu teknik dengan fokus mempertimbangkan dengan menentukan orang mana saja yang dapat untuk memberikan data secara maksimal.	bahwa sejumlah tenaga kerja professional yaitu pendamping yang mana sudah dikerahkan hanya sekedar membantu dalam penyuluhan dan hanya melakukan pendataan. Kedua, yaitu berhubungan dengan kendala yang mana merupakan kendala internal serta kendala eksternal. Kendala internal yang dimaksud yaitu kurangnya tingkat produksi serta tidak ada atau tersedianya galeri sebagai wadah untuk memamerkan atau menjual produk-produk usaha dari para pelaku UMKM. Untuk kendala atau masalah eksternal sendiri meliputi masih kurang atau rendahnya pada minat serta bentuk kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya dalam mengikuti sebuah pembinaan, kendala atau masalah lainnya yaitu ketidakcukupan pada jumlah tenaga profesional dari dinas. Ketiga, yaitu berhubungan dengan solusi, yaitu mengenai penyediaan tempat

No.	Judul, Tahun, Nama Peneliti	Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Temuan
					sarana serta prasarana sebagai wadah penunjang promosi seperti pameran atau bazara untuk pelaku UMKM, serta dalam memberikan bentuk sosialisasi tentang pentingnya untuk mendapatkan pembinaan bagi para pelaku usaha.
4	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka <i>Millenium Development</i>	Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No. 1	Untuk memahami tentang dengan cara apa strategi-strategi pada pemberdayaan UKM yang berdasar pada sumberdaya lokal guna meningkatkan tingkat	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian survei dengan kesimpulan yang hasilnya melalui sitem pengujian hipotesis dengan data-data kuesioner.	Pemberdayaan UMKM Kabupaten Kendal dalam rangka MDGs 2015, menghadapi beberapa permasalahan yang meliputi adanya keterbatasan pada kualitas SDM para pelaku UMKM yang ditandai dengan sedikitnya jumlah para pelaku UMKM yang memperoleh pendidikan tinggi, kemudian adanya keterbatasan akses terhadap sumberdaya produktif yaitu pada permodalan, masalah infrastruktur, akses digital atau teknologi seperti keterbatasan permodalan dan akses teknologi, sarana sebagai penunjang dalam kemudahan para pelaku dalam menjual bentuk usahanya, serta adanya

No.	Judul, Tahun, Nama Peneliti	Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Temuan
	<i>Goals</i> 2015 (Studi Kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal). (2015). Dwi Prasetyo Hadi		kesejahteraan pada masyarakat di daerah.		kendala pada birokrasi pemerintah dalam kualitas serta kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah dalam rangka pembinaan serta pendampingan bagi para pelaku UMKM
5	Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Batik Dalam Lingkup Klaster Batik Kota Semarang. (2014).	Journal of Public Policy and Management Review	1. Untuk mengetahui suatu pelaksanaan program usaha mikro batik yang mana dalam lingkup	Penelitian ini menerapkan bentuk paradigma penelitian interpretivisme atau suatu pendekatan dengan metode kualitatif. Sedangkan tipe pada penelitian yang dipilih	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dikatakan belum mampu dalam melakukan program dengan cukup baik yang sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 20 tahun 2008. Hal ini disebabkan karena masih tingginya para anggota klaster yang mana masih belum mendapatkan bentuk pelatihan. Hasil dari pelaksanaan program pemberdayaan pada usaha mikro batik dalam cakupan lingkup klaster batik di Kota Semarang

No.	Judul, Tahun, Nama Peneliti	Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Temuan
	Cahyo Uji Purnanto,Marga reta Suryaningsih, Kismartini (2014)		klaster batik di Kota Semarang. 2. Untuk memahami atau mengetahui mengenai faktor apa saja dalam secara pendukung dan penghambat pelaksanaan pada program usaha mikro batik dalam lingkup klaster	menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk memperoleh bentuk gambaran secara komprehensif mengenai fokus pada penelitian yang mana merupakan pelaksanaan program pemberdayaan pada usaha mikro batik dalam lingkup klaster batik di Kota Semarang.	dikatakan belum baik dikarenakan masih banyak masalah atau kendala yang belum bisa diselesaikan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang diantaranya pada aspek jangkauan akses pemasaran, perluasan dalam akses pendanaan, keterbatasan dalam adanya bahan baku produksi karena sulit untuk didapatkan, harga pada bahan- bahan baku yang terlampau tinggi, serta pada sarana maupun alat-alat yang kurang menunjang serta juga tempat untuk promosi bagi hasil produk yang masih belum tersedia.

No.	Judul, Tahun, Nama Peneliti	Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Temuan
			batik di Kota Semarang.		

Sumber : Diolah Peneliti

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan konsep dalam proses memecahkan permasalahan publik melalui keputusan dalam kebijakan publik. Menurut Sondang P. Siagian administrasi publik merupakan keseluruhan dalam suatu proses atau kegiatan kerjasama atau kooperasi antar dua orang atau lebih dengan dasar rasionalitas dengan maksud memperoleh suatu sasaran yang mana telah diputuskan sebelumnya (Darmadi, 2014).

Menurut Dimock, Dimock, & Fox melihat administrasi publik sebagai suatu produksi atau hasil barang atau jasa yang memiliki fungsi sebagai pelayanan kebutuhan pada masyarakat (Keban, 2014). Hal ini bermakna bahwa administrasi publik juga merupakan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik.

Nigro & Nigro memandang administrasi publik merupakan upaya kerjasama oleh kelompok dalam lingkungan publik antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang mana memiliki peran dalam proses memformulasikan suatu kebijakan publik (Keban, 2014). Pandangan tersebut menekankan pada proses institusional bagaimana kerjasama dalam kegiatan publik berbeda dengan apa yang dijalankan oleh administrasi swasta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Barton & Capel mengemukakan bahwasannya administrasi publik dilihat sebagai “*the work of government*” atau merupakan suatu aktivitas yang mana dijalankan oleh pihak pemerintah (Keban, 2014). Hal tersebut diartikan sebagai

adanya keterlibatan anggota atau personil dalam proses untuk memberikan pelayanan publik.

Selain itu, Nicholas Henry menjelaskan bahwa administrasi publik yaitu kombinasi teori dan praktik yang kompleks untuk menjelaskan tentang pemahaman antara peran pemerintah dengan masyarakat dan kebijakan publik yang di dorong untuk lebih responsif terhadap permasalahan kebutuhan sosial (Keban, 2014). Definisi ini memiliki arti bahwa terjadi kombinasi teori serta praktik dengan proses manajemen untuk mencapai nilai normatif masyarakat dalam administrasi publik.

Dari sejumlah definisi pendapat ahli sebelumnya bisa disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu upaya kerjasama dalam lingkup pemerintahan yang mana memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan publik serta memberikan layanan-layanan kebutuhan sosial masyarakat dengan melalui kebijakan yang telah diformulasikan secara bertahap sesuai dengan masalah yang terdapat dalam kepentingan umum.

Menurut Denharardt & Denhardt ditemukan 3 perspektif pada administrasi publik:

1. *Old Public Administration* (Administrasi Publik Klasik)

Paradigma ini memiliki fokus pada cara seperti apa pemerintah menjalankan langkah administrasi dengan efektif, efisien, demokratis, terbebas dari tindak rekayasa kekuasaan, serta dengan cara apa langkah-langkah pemerintah mampu berjalan dengan tepat, benar dan berhasil (Wilson, 1887). Dengan kata lain, paradigma administrasi publik klasik memiliki fokus perhatian dalam interaksi serta kerjasama pada lembaga pemerintahan yang mana diwujudkan melalui struktur berjenjang atau hirarki dan berpusat

kepada pemerintah. Paradigma ini dikatakan tidak berjalan efektif serta efisien, serta tidak produktif dan miskin inovasi sehingga timbul gerakan reformasi terhadap manajemen sektor publik dengan kemunculan paradigma *New Public Management (NPM)*.

2. *New Public Management (NPM)*

Paradigma ini merupakan bentuk teori pada manajemen sektor publik yang memiliki anggapan bahwa penerapan pada manajemen di sektor swasta dikatakan lebih optimal dibandingkan pada manajemen di sektor publik sehingga konsep-konsep sektor swasta digunakan untuk meningkatkan kinerja administrasi publik. Manfaat dalam penerapan NPM sendiri yaitu pembangunan birokrasi selalu mengamati mekanisme pasar, menekan kontrak agar memperoleh hasil, dapat lebih tanggap pada kebutuhan konsumen, lebih menginstruksikan (*steering*) dan tidak menjalankan sendiri (*rowing*), melaksanakan pencabutan aturan atau deregulasi, serta memberdayakan bagi para pelaksana untuk bekerja lebih efektif (Rosenbloom & Kravchuck, 2005). Pada NPM lebih menekankan pada budaya pada organisasi yang mana lebih bersifat inovatif, memiliki jiwa wirausaha, fleksibel, serta tujuan yang dicapai dibandingkan dengan budaya orientasi pada proses dan input serta taat asas. Dalam perspektif *new public management* mendapatkan kritik yang mana terdapat permasalahan dalam nilai yang ada dikedepankan seperti produktivitas, rasionalitas, efisien, serta bisnis dikarenakan dapat bersinggungan dengan nilai-nilai pada kepentingan publik serta demokrasi.

3. *New Public Service* (NPS)

Paradigma ini bentuk dari teori manajemen publik yang mana menyampaikan egaliter serta kesetaraan hak diantara warga negara. Proses yang diterapkan dalam memperoleh hasil atau tujuan yaitu dengan cara membangun bentuk kerjasama serta gabungan antar lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pada perspektif ini membalikkan para pihak yang terlayani yaitu pelanggan (*customer*) ke tempat yang sebenarnya ialah warga masyarakat (*citizen*). Selain itu, *new public service* memiliki fungsi pada administrator publik guna mengikutsertakan masyarakat ke dalam pemerintahan serta memiliki tugas agar dapat melayani masyarakat.

Menurut Denhardt (2003), peran administrator publik bukan lagi memfokuskan atau memengaruhi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip *new public service* sebagaimana menurut pandangan (Denhardt, R. B. & Denhardt, 2003) antara lain :

- 1) Memberikan layanan kepada masyarakat atau warga negara bukan pelanggan
- 2) Kepentingan publik yang diprioritaskan
- 3) Kewarganegaraan dipandang lebih penting daripada kewirausahaan
- 4) Berpikir lebih strategis atau penuh perhitungan dan bertindak untuk lebih demokratis
- 5) Sadar bahwa tanggung jawab sulit
- 6) Menangani daripada mengontrol
- 7) Lebih menghargai terhadap orang, bukan hanya produktivitas

New Public Service (NPS) juga dikatakan sebagai *governance* yang mana utamanya melibatkan pada kekuatan masyarakat yang mana sebagai warga negara yang cara politik serta demokrasi yang diterapkan pada sektor publik mendominasi.

1.6.3 Kebijakan Publik

James E. Anderson (Islamy, 2009) menjelaskan bahwasannya suatu kebijakan merupakan “*a purposive course of action folowed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern*” atau merupakan usaha yang memiliki sasaran dan dijalankan oleh pribadi ataupun berkelompok untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.

Kebijakan Publik menurut Pressman dan Widavsky sebagaimana yang dikutip (Winarno, 2002) merupakan hopotesis yang mana memiliki situasi awal serta dampak yang mana dapat diramalkan.

Defini kebijakan publik menurut Robert Eyestone sebagaimana dikutip (Agustino, 2008) merupakan “hubungan yang terjadi diantara elemen pemerintah dengan kawasannya”.

Dari beberapa definisi atau penjelasan para ahli di atas dapat ditarik simpulan yaitu bahwasannya kebijakan publik ialah rangkaian dari keputusan kebijaksanaan yang mana diambil oleh seseorang atau lebih guna mewujudkan hasil yang telah ditentukan sebelumnya di dalam masyarakat.

Terdapat rangkaian penting dalam proses kebijakan publik yaitu formulasi atau perumusan kebijakan (*policy formulation*), implementasi atau pelaksanaan

kebijakan (*policy implementation*), serta evaluasi atau penilaian kebijakan (*policy evaluation*).

Berdasarkan Willian Dunn yang dikutip (Winarno, 2007) tahapan atau tingkatan pada proses pembentukan kebijakan publik antara lain :

1) Penyusunan Agenda.

Pejabat-pejabat publik yang telah diangkat serta dipilih kemudian menempatkan permasalahan-permasalahan ke dalam agenda publik. Sebelum pada agenda kebijakan, permasalahan telah berkompetisi untuk selanjutnya dapat masuk ke dalam proses agenda kebijakan. Dalam tahapan inipun bisa terjadi suatu persoalan atau kendala tidak tersentuh sedangkan terdapat kendala lain yang ditentukan sebagai fokus pada pembahasan, dan terdapat kendala yang sementara ditunda dalam waktu yang tidak diketahui dikarenakan adanya sebab tertentu.

2) Formulasi Kebijakan.

Setelah suatu permasalahan masuk ke dalam proses agenda kebijakan untuk dianalisis dengan pembuat-pembuat kebijakan kemudian ditarik definisi untuk setelahnya ditentukan pemecahan atas permasalahan yang paling baik. Pemecahan permasalahan didapatkan daripilihan-pilihan atau alternatif dari suatu kebijakan (*policy alternatives/ policy options*) yang telah terjadi. Pada formulasi kebijakan, setiap alternatif akan berkompetisi supaya nantinya dapat dipilih untuk menjadi kebijakan yang akan diambil guna sebagai pemecahan permasalahan. Pada tahap formulasi ini setiap aktor berkompetisi dan berjuang untuk dapat mengusulkan berbagai pemecahan permasalahan yang terbaik.

3) Adopsi Kebijakan.

Salah satu alternatif atau pilihan kebijakan dari alternatif-alternatif kebijakan yang telah ada kemudian diajukan dari perumus suatu kebijakan yang akan diadopsi oleh pihak legislatif, pihak konsensus kebijakan antara direktur dari lembaga ataupun oleh putusan peradilan kebijakan.

4) Implementasi Kebijakan.

Kebijakan yang mana telah dipilih atau diperoleh setelahnya harus dilakukan agar tidak hanya menjadi catatan-catatan elit. Kebijakan tersebut diambil dan dilaksanakan oleh badan administrasi atau pelayanan yang mana sebagai mobilisasi seluruh SDM maupun pada finansial. Dalam tahapan inipun beberapa kepentingan akan tetap untuk saling bersaing. Dalam hal inipun terdapat beberapa pelaksanaan kebijakan yang nantinya akan mendapat dukungan oleh pelaksana-pelaksana kebijakan namun ada juga beberapa implementasi kebijakan lainnya yang memungkinkan untuk diperdebatkan oleh para implementor kebijakan.

5) Evaluasi Kebijakan.

Kebijakan tadi yang telah dilaksanakan kemudian harus dievaluasi serta dinilai dengan tujuan dapat mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah dibuat guna mencapai dampak atau tujuan yang diharapkan yaitu dapat sebagai pemecah permasalahan yang mana dihadapi oleh beberapa masyarakat tertentu.

1.6.4 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan yang cukup krusial pada pelaksanaan mekanisme kebijakan publik. Program dalam kebijakan

dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang diharapkan (Kasmad, 2018). Sebagaimana Ripley dan Franklin, pelaksanaan atau implementasi merupakan hal yang berlangsung setelah peraturan atau undang-undang diputuskan yang mana menyajikan kebijakan, kekuasaan atau pengaruh program, manfaat, atau *tangible output* (Kasmad, 2018).

Van Meter dan Van Horn menerangkan perihal bagaimana menetapkan batasan pelaksanaan kebijakan yakni sebagai usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok, pihak pemerintah ataupun swasta guna memperoleh hasil yang telah ditetapkan lebih dahulu melalui keputusan-keputusan yang telah dibuat (Kasmad, 2018).

Dari sejumlah definisi implementasi kebijakan publik sebelumnya dapat disimpulkan dalam garis besar bahwasanya implementasi kebijakan ialah usaha yang diterapkan oleh pihak pemerintah guna mencapai hasil atau tujuan dalam suatu kebijakan yang mana akan diberikan kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan publik dapat dikatakan berhasil menurut S. Grindle (Riant Nugroho, 2003) terdapat 2 indikator yang dapat memberikan pengaruh suatu pelaksanaan kebijakan publik, yaitu isi pada kebijakan (*content of policy*) serta lingkungan dalam kebijakan (*content of implementation*). Konsep utamanya merupakan proses sesudah kebijakan dimodifikasi selanjutnya diterapkan proses implementasi kebijakan. Indikator menurut Grindle yang memberi pengaruh pada tingkat implementasi kebijakan diantaranya:

- 1.) Isi Kebijakan (*Content of Policy*) Meliputi : a. *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Memberikan Pengaruh); b. *Type of Benefits* (Tipe

Keuntungan); c. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Didapatkan); d. *Site of Decision Making* (Situs Pengambilan Keputusan); e. *Program Implementer* (Pelaksana Program); f. *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang akan Diterapkan)

2.) Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*) Meliputi: a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan, serta Strategi dari Aktor yang Terlibat); b. *Institution and Regime Characteristic* (Lembaga serta karakteristik rezim); c. *Compliance and Responsiveness* (Kepatuhan serta Respon Pelaksana)

Pada pelaksanaan atau implementasi kebijakan, terdapat model pendekatan pada perkembangan studi pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang terbagi menjadi dua antara lain model pendekatan *top-down* dan model pendekatan *bottom up*.

a. Pendekatan *Top-Down*

Pada pendekatan dengan model *top down* yaitu menggunakan cara berpikir melalui sisi atas kemudian melaksanakan penyelarasan ke sisi bawah agar dapat mengamati keberhasilan atau kegagalan dalam proses implementasi atau pelaksanaan kebijakan. Menurut Gunn, metode ini disebut "*policy centered*" dikarenakan semata-mata berfokus pada kebijakan serta adanya usaha guna mendapatkan berbagai fakta mengenai apakah suatu kebijakan dapat mencapai tujuan atau tidak dalam diimplementasikannya (Kasmad, 2018). Pendekatan *top-down* memfokuskan pada ketersediaan birokrasi (unit pelaksana), kewenangan, tolak ukur atau standar pelaksana, koordinasi, dll. Pendekatan

ini diawali dari penentuan atau keputusan oleh pemerintah, pengakajian hingga sejauh mana administrator melakukan atau bahkan gagal menjalankan akan penentuan atau keputusan tersebut, serta menemukan penyebab apa saja yang melandasi suatu keberhasilan atau bahkan kegagalan pada pelaksanaan kebijakan. Pendekatan model ini menitikberatkan pada sejauh mana atas kesuksesan dalam mencapai hasil atau tujuan dan pada metode ini menganggap kebijaksanaan memiliki capaian yang jelas akan tetapi dalam kenyataanya tujuan tersebut sering bertentangan (Tacjhan, 2006)

Pendekatan ini juga dikatakan sebagai pendekatan *command and control* yang mana memiliki arti sebagai menyerahkan suatu perintah oleh atasan kepada bawahan serta bagaimana pihak atasan memantau bawahannya dalam pelaksanaannya untuk mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Terdapat beberapa ahli dalam menerapkan model-model pelaksanaan atau implementasi kebijakan melalui pendekatan *top-down* yaitu Van Meter and van Horn , George C. Edward III, Grindle, dll. Kekurangan dalam pendekatan *top-down* yaitu fokus pada para pengambil ketetapan pada senior, yang mana umumnya semata-mata bermain peran marginal dalam proses implementasi kebijakan dibandingkan dengan para pejabat publik di tingkat yang terbilang lebih rendah serta anggota-anggota publik.

b. Pendekatan *Bottom-Up*

Pada pendekatan ini memfokuskan bagaimana pentingnya dalam mengamati perspektif dalam pelaksanaan kebijakan yaitu oleh birokrat pada level bawah (*street level bureaucrat*) serta kelompok-kelompok sasaran

kebijakan (*target group*). Pendekatan model *bottom-up* menegaskan mengenai cara-cara yang mana dipergunakan oleh pihak pelaksana saat menetapkan hasil atau tujuan yang akan terlaksana oleh kebijakan publik. Pendekatan ini membidikkan fokus pada keterkaitan-keterkaitan formal serta informal yang mana membangun jaringan pada kebijakan yang berperan serta dalam penyusunan dan implementasi kebijakan (Tadjhan, 2006).

Bottom-up akan mengalihkan kajian dari pelaksanaan dari segala keputusan kebijakan serta memberikan kembali ke masalah kebijakan, dengan demikian dapat mengkaji para aktor publik serta swasta dan para lembaga yang mana ikut serta dalam masalah tersebut. Dalam *bottom-up*, peranan birokrat atau pejabat pada level bawah dikatakan sangat penting berkenaan dengan posisi dalam melaksanakan aktivitas dalam mewujudkan *output* suatu kebijakan atau menyampaikan keluaran tersebut untuk *target group*. Implementasi akan berhasil dengan pendekatan ini apabila pada awal proses perumusan kebijakan kelompok sasaran (*target group*) ikut dilibatkan. Terdapat sejumlah ahli dalam menerapkan model implementasi kebijakan dengan pendekatan *bottom-up* yaitu Elmore, Lipsky, Herjn Porter, dll.

Dalam implementasi kebijakan, terdapat banyak model dari berbagai ahli. Model-model kebijakan tersebut berusaha menjelaskan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan atas teori pengelompokan oleh Peter de Leon dan Linda de Leon (2001) para ahli pada generasi pertama tahun 1970 an memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Pada generasi kedua yaitu tahun 1980 an merupakan

generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang sifatnya “dari atas ke bawah” atau biasa kita kenal dengan istilah “*Top Downer Prespective*”. Pada prespektif ini, fokusnya lebih pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang diputuskan secara politik. Kemudian pada generasi ketiga tahun 1990 an memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih mampu menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan.

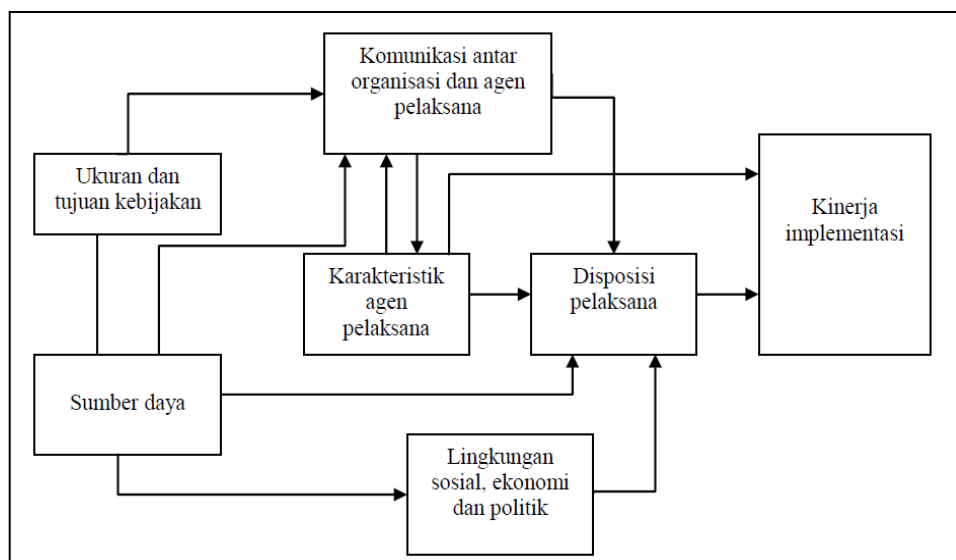
Model implementasi oleh Van Meter dan Van Horn berusaha memperbaiki dan melengkapi kelemahan yang dimiliki oleh pendekatan implementasi kebijakan dari atas ke bawah “*Top-Down Approach*” sekaligus menjadi kelebihan yang dimiliki oleh model implementasi Van Meter dan Van Horn, yaitu :

1. Kejelasan dalam variabel-variabel implementasi kebijakan
2. Kejelasan hubungan saling mempengaruhi antara variabel-variabel

Proses pada pelaksanaan ini menciptakan suatu pengikatan atau performansi dalam suatu kebijakan yang mana pada dasarnya dengan maksud tertentu dilakukan guna memperoleh kemampuan pada pelaksanaan kebijakan yang tinggi, yang mana berjalan dalam ikatan beraneka ragam faktor. Model pendekatan ini mengumpamakan bahwasanya pelaksanaan kebijakan yang berjalan dengan linear dari pelaksana, ketetapan politik serta kemampuan pada kebijakan publik (Nugroho, 2003). Model pendekatan ini menyampaikan bahwasannya kemampuan dari kebijakan akan dipengaruhi oleh indikator-indikator yang saling bersangkutan, antara lain:

- a. Komunikasi antar suatu organisasi terkait serta kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- b. Ukuran dan tujuan kebijakan/standar serta sasaran kebijakan
- c. Karakteristik organisasi pelaksana
- d. Sumber daya
- e. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
- f. Sikap para pelaksana

Gambar 1.3. Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn



Sumber : buku *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*
Subarsono, (2017)

Variabel-variabel dalam implementasi kebijakan publik menurut model pendekatan Van Meter dan Van Horn meliputi:

- a) Ukuran dan tujuan kebijakan.

Kemampuan atau kinerja pada pelaksanaan kebijakan pada dasarnya dinilai melalui susunan keberhasilannya yaitu dari aspek variabel ukuran serta tujuan kebijakan yang mana memiliki sifat pragmatis dengan sosial budaya pada

tingkat implementor kebijakan. Van Meter dan Van Horn menyampaikan, untuk dapat mengukur suatu kinerja atau kemampuan pelaksanaan kebijakan ditegaskan bahwa perlunya tolak ukur serta objek tertentu yang mana perlu diperoleh oleh pelaksana-pelaksana kebijakan. pelaksanaan kebijakan yang sukses, mungkin saja dikatakan gagal (*frustrated*) yaitu apabila pada pelaksana-pelaksana (*officials*), tidak menyadari dengan penuh pada standar serta tujuan kebijakan. Standar serta tujuan kebijakan sendiri mempunyai kaitan penuh dengan aspek disposisi para pelaksana (*implementors*). Disposisi para pelaksana (*implementors*) memiliki arah pada standar serta tujuan kebijakan yang mana hal tersebut dikatakan krusial.

b) Sumber daya.

Keberhasilan pada pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan baik. Sumber daya ialah paling utama dalam menetapkan arah pencapaian pada suatu pelaksanaan kebijakan yaitu sumber daya manusia. Tahapan pada setiap pelaksanaan menuntut akan adanya ketersediaan sumber daya manusia yang harus bermutu selaras dengan pekerjaan yang sesuai oleh suatu kebijakan yang mana sudah ditentukan. Selain itu, sumber daya penting lainnya yaitu sumber daya keuangan atau finansial dan sumber daya waktu sebagai bentuk kalkulasi krusial atau mendasar dalam aspek keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sama halnya yang telah disampaikan oleh Derthicks bahwa: "*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*". Van Mater dan Van Horn mengonfirmasi bahwa: "Sumber daya

kebijakan (*policy resources*) juga sama penting dengan komunikasi. Sumber daya pada kebijakan ini diharuskan terlibat dengan maksud agar membuat lebih lancar pelayanan pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya tersebut berbentuk dana atau intensif-intensif lainnya yang mana mampu membuat lancar pada pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Jika pada aspek dana/intensif kurang dan terbatas dalam pelaksanaan kebijakan, maka ini akan menyumbang kegagalan pada implementasi kebijakan.

c) Karakteristik organisasi pelaksana.

Dalam variabel ini, agen pelaksana perlu adanya atensi yakni mencakup organisasi formal serta organisasi informal yang nantinya akan ikut serta dalam proses pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikatakan penting karena hasil kinerja pada implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh karakteristik yang cocok dan tepat dengan para agen pelaksananya. Hal tersebut berhubungan pada konteks kebijakan yang nantinya dilakukan di beberapa kebijakan yang diharuskan implementor kebijakan disiplin serta tegas. Terdapat konteks lain yang juga perlu agen pelaksana yang bersifat partisipatif, persuasif serta demokratis. Van Horn dan Van Meter menyatakan tentang faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap organisasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu: a) Kemampuan serta ukuran staf pada suatu organisasi; b) Tingkat pengendalian bersifat berstrata atas ketetapan-ketetapan bagian serta mekanisme dalam suatu badan pelaksana; c) Sumber-sumber politik dalam suatu badan organisasi (meliputi suatu dukungan di antara para anggota badan legislatif serta eksekutif); d) Kekuatan pada suatu badan organisasi; e) Tahapan

komunikasi yang bersifat terbuka dalam arti jaringan kerja pada komunikasi secara vertikal maupun horizontal secara bebas dengan tingkat pada kebebasan yang relatif tinggi dalam sebuah komunikasi dengan para individu di luar badan organisasi; f) Kaitan formal serta informal pada suatu badan organisasi dengan suatu badan pembuat keputusan-keputusan atau suatu pelaksana keputusan.

d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Agar dalam kebijakan publik dapat terlaksanakan secara efektif, Van Horn dan Van Mater mengatakan, para individu (implementor) harus paham dengan standar tujuan yang mana harus akuntabel atas pencapaian kriteria atau standar serta tujuan atau sasaran kebijakan tersebut, sebab aspek standar serta tujuan diharuskan diinformasikan ke para pelaksana. Komunikasi secara garis besar pengutaraan suatu pemberitahuan bagi para implementor kebijakan nantinya menjadi sebuah ukuran serta sasaran yang mana perlu konsisten serta seragam (*consistency and uniformity*) dari sumber-sumber pemberitahuan. Apabila kejelasan serta konsistensi dan keseragaman akan suatu standar serta sasaran kebijakan tidak ada, hal ini nantinya membentuk standar serta tujuan suatu kebijakan yang tidak mudah untuk dapat diperoleh. Dengan adanya kejelasan yang dimaksud, para implementor kebijakan nantinya mampu memahami dan mengetahui tentang hal yang diinginkan serta mengerti hal yang perlu dilaksanakan.

e) Disposisi atau sikap para pelaksana.

Berdasarkan pandangan Van Metter dan Van Horn "sikap penerimaan atau penolakan dari para agen implementor kebijakan amat berpengaruh pada hasil

kesuksesan atau bahkan kegagalan pada pelaksanaan kebijakan publik. Hal tersebut bisa mungkin saja terjadi dikarenakan suatu kebijakan yang dilakukan tidaklah perolehan dari perumusan warga yang mengetahui secara baik dengan segala masalah serta perkara yang telah mereka rasakan dan alami. Namun, biasanya kebijakan publik bersifat *top-down* yang mana sangat berpeluang juga bagi pihak pengambil keputusan suatu kebijakan tidak menyadari atau justru juga tidak sanggup untuk mencapai keinginan, keperluan atau masalah-masalah yang mana perlu dikerjakan. Van Mater dan Van Horn mengungkapkan terkait disposisi pada proses pelaksanaan kebijakan diawali dengan penyaringan atau filtrasi (*befiltered*) mulanya dengan pandangan dari para pelaksana (*implementors*) dalam limit mana suatu kebijakan tersebut dijalankan. Adapun terdapat tiga faktor terkait tanggapan yang berpengaruh pada keterampilan atau kemampuan serta keinginannya guna melakukan suatu kebijakan, diantaranya, pertama yaitu pemahaman serta pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, pengetahuan (*cognition*), kedua yaitu arah tanggapan pelaksana apakah menerima, netral atau bahkan menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan yang ketiga yaitu ketegasan terhadap kebijakan. Di sisi lain, jika penerimaan atau perolehan yang menyebar atau memperluas serta mendalam atau terperinci terhadap standar serta tujuan pada kebijakan di antara mereka yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan kebijakan tersebut, adalah sebuah potensi besar atas berhasilnya pada pelaksanaan kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi pada para pelaksana (*implementors*) berpengaruh pada aspek

pelaksana (*performance*) kebijakan. Terbatas atau kurangnya intensitas pada disposisi dapat mengakibatkan ketidakberhasilan bentuk pelaksanaan kebijakan.

- f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Aspek penting akhir yang harus diperhatikan untuk mengukur performa pada pelaksanaan kebijakan yaitu seberapa jauh aspek eksternal pada lingkungan andil dalam menekan pencapaian kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang kurang mendukung nantinya bisa memicu sumber-sumber permasalahan dari kemunduran tingkat performa atau kinerja pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, harus ada tindakan atau usaha pelaksanaan kebijakan dengan mewajibkan kondisi pada lingkungan eksternal yang mendukung atau menguntungkan.

Pada penelitian ini menggunakan model pendekatan *top-down* karena pada penelitian ini lebih melihat faktor-faktor pada peran dinas dalam program pemberdayaan sehingga implementasi kebijakan yang dilihat adalah implementasi kebijakan dengan pendekatan *top-down*. Dari sekian banyak ahli atau tokoh referensi yang ada, peneliti memilih menggunakan model implementasi Van Metter dan Van Horn.

1.6.6 Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM

Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM adalah suatu program wujud dari kebijakan peningkatan dan pengembangan UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UMKM di Indonesia yang dibentuk sejak tahun 2014 melalui Peraturan Kemenkop No. 9 Tahun 2013. Pemerintah memberikan perhatian kepada pelaku UMKM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi

nasional dengan dukungan iklim usaha yang mendukung atau menguntungkan, dan sarana serta prasarana yang memadai dan juga terintegrasi dengan dilaksanakannya program PLUT. PLUT sendiri merupakan unit yang menyediakan layanan pendampingan usaha yang mencakup semua atau bersifat inklusif dan pemberdayaan lainnya bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, menengah, serta wirausaha secara menyeluruh serta terpadu guna meningkatkan dan mengembangkan daya saing produktivitas, kualitas kerja, nilai tambah usaha, kapasitas serta pemulihan usaha pada wirausaha, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. PLUT-KUMKM bertujuan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui layanan non-finansial seperti pendampingan usaha, konsultasi bisnis, pelatihan manajerial, dan fasilitasi legalitas. Program ini menjadi upaya nyata pemerintah dalam mendorong UMKM agar naik kelas dan lebih kompetitif.

PLUT berperan penting dalam mendorong transformasi usaha mikro menjadi usaha kecil yang lebih mapan. Program ini memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan legalitas, meningkatkan kompetensi usaha, dan mengakses pasar yang lebih luas. Dengan hadirnya PLUT, UMKM diharapkan dapat memenuhi syarat formal seperti pencatatan keuangan, pengurusan izin usaha, dan adaptasi teknologi digital, yang semuanya menjadi prasyarat untuk berkembang.

Tujuan dari PLUT meliputi :

- 1) Meningkatkan kualitas atau mutu kelembagaan Koperasi serta UMKM.

- 2) Meningkatkan kompetensi atau keahlian pada sumber daya manusia Koperasi serta UMKM.
- 3) Meningkatkan produksi serta produktivitas usaha Koperasi serta UMKM.
- 4) Meningkatkan akses hingga jangkauan pemasaran produk-produk Koperasi serta UMKM.
- 5) Meningkatkan akses Koperasi serta UMKM dengan segala sumber pendanaan yang mana tidak mengikat.
- 6) Meningkatkan kapasitas pada Koperasi serta UMKM dalam memanfaatkan peran teknologi serta informasi.
- 7) Meluaskan sistem kerja sama dengan para lembaga dan atau pemangku sebuah kepentingan lainnya dalam melaksanakan program pendampingan serta pemberdayaan lainnya bagi Koperasi serta UMKM

Terdapat lima topik pendampingan pada PLUT kabupaten/ kota antara lain:

- a) Bidang kelembagaan, menyediakan layanan mengenai mekanisme pembentukan badan hukum, mendaftarkan bisnis perseorangan, diskusi perihal sertifikasi serta sisi penguatan institusi atau lembaga lainnya.
- b) Bidang sumber daya manusia (SDM), menyediakan layanan mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam menjalankan usaha, pelatihan gratis terkait peningkatan kualitas SDM pada para pelaku usaha.
- c) Bidang produksi, menyediakan pelatihan mengenai topik seputar produksi seperti sarana pengolahan produk, bahan baku, standarisasi produk, penggunaan teknologi pengolahan, serta pengemasan produk.

- d) Bidang pembiayaan, menyediakan pelatihan terkait perencanaan usaha serta pembuatan proposal dalam pengembangan usaha, fasilitas konsultasi atau mediasi dengan lembaga atau organisasi keuangan untuk mendapatkan pembiayaan, dan berdiskusi mengenai manajemen keuangan dalam berbisnis.
- e) Bidang pemasaran, menyediakan pelatihan mengenai informasi pasar yang ada, pendampingan terkait fasilitas melakukan kemitraan, serta pemanfaatan teknologi digital.

Empat fokus prioritas Kementerian Koperasi dan UMKM terhadap pelaku usaha melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu meliputi :

- a. Pelaku usaha UMKM difasilitasi dengan layanan-layanan sebagai pemenuhan pengembangan atau peningkatan usaha.
- b. Melakukan mediasi sebagai upaya membangun suatu hubungan bagi pelaku KUMKM dengan pemangku kepentingan lainnya.
- c. Memberi stimulasi atau memotivasi progres peningkatan para pelaku KUMKM
- d. Meningkatkan mutu atau kelebihan pelaku UMKM secara produktif, kreatif serta inovatif.

Fokus prioritas tersebut dilakukan dengan syarat proses untuk melaksanakan program dengan ditetapkannya, yaitu :

- 1. Dinas menyediakan gedung untuk PLUT-KUMKM untuk pelaksanaan pelayanan PLUT.

2. Menyediakan paling sedikit 7 (tujuh) layanan dari 10 (sepuluh) jenis layanan PLUT-KUMKM yang tercantum dalam Pasal 3, antara lain:

- a) Pendampingan serta konsultasi usaha
- b) Proses daftar atau registrasi usaha ke dalam sistem perizinan yang terintegrasi secara digitalisasi atau elektronik
- c) Pelatihan-pelatihan manajerial serta secara teknis atau praktis
- d) Memenuhi atau realisasi dalam hal sertifikasi serta pada standarisasi produk usaha
- e) Adanya pengembangan pada produk unggulan suatu daerah
- f) Adanya pengembangan pada merek kemas atau label produk usaha
- g) Pemasaran serta cara berpromosi produk dan akses mengenai pemberitahuan *market* atau pasar
- h) Inkubasi bisnis
- i) Pengumpulan dan pencatatan terkait koperasi, UMKM dan wirausaha
- j) Seleksi pada pelaku usaha serta kurasi pada produk UMKM

3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung layanan PLUT KUMKM, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31, antara lain:

- a) Layanan jasa konsultasi serta pendampingan usaha
- b) Ruangan kerja bagi pengelola

- c) Ruang kerja untuk bersama (*coworking place*)
 - d) Pelatihan-pelatihan secara manajerial serta teknis
 - e) Pemasaran serta mengiklankan produk melalui galeri
 - f) Layanan jasa pengembangan merek kemas atau label produk usaha
 - g) Komputer, telepon serta adanya internet
 - h) Fasilitas-fasilitas umum lainnya
4. Mengalokasikan dana APBD sebagai honorarium atau pembayaran konsultan atau pendamping, pengelolaan, teknis operasional, serta layanan PLUT KUMKM
 5. Menunjuk kepala dinas provinsi/kabupaten/kota sebagai koordinator pelaksana program PLUT KUMKM

Dapat disimpulkan bahwa PLUT memiliki tujuan dalam memfasilitasi pemberian layanan pengembangan bagi usaha UMKM agar dapat meningkatkan atau mengembangkan nilai tambah, produktivitas, serta daya saing bagi para UMKM agar mampu naik kelas dengan peran pemerintah di dalam melaksanakan pengembangan bisnis atau usaha dan pendampingan serta pemberdayaan bisnis atau usaha bagi para pelaku UMKM.

1.6.7 Usaha Mikro

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana telah diatur

dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Usaha mikro merupakan salah satu wujud dari usaha yang bersifat produktif yang mana dimiliki oleh perorangan atau suatu organisasi atau badan usaha milik perorangan yang mana menangkup syarat atau standar diantaranya:

- a. Mempunyai jumlah kekayaan bersih atau aset dengan paling banyak sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang mana bangunan sebagai tempat bisnis maupun usaha dan tanah tidak termasuk,
- b. Mempunyai total perolehan dari pendapatan pertahunan dengan maksimal sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Usaha mikro mempunyai karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Jenis pada barang atau komoditas bersifat tidak selalu tetap namun dapat berganti sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi
- b. Lokasi atau area yang digunakan sebagai tempat usaha bisa berpindah sewaktu-waktu atau tidak selalu menetap.
- c. Belum adanya upaya dalam melakukan administrasi atau pengurusan keuangan baik yang sederhana sekalipun.
- d. Tidak dan belum dalam memisahkan hasil usaha yaitu keuangan dengan keuangan usahanya.
- e. Sumber daya manusia yang mana pengusaha tersebut belum mempunyai jiwa kewirausahaan yang mencukupi atau memadai.
- f. Tingkat latar belakang mengenai Pendidikan terhitung relatif sangat rendah.

- g. Kebanyakan pelaku usaha belum memiliki akses pada pendanaan di perbankan, namun tidak menutupi bahwa sebagian dapat mengakses pada lembaga-lembaga keuangan non-bank.
- h. Banyak dari para pelaku usaha belum memiliki bukti perizinan mendirikan suatu usaha atau syarat atas legalitas berdirinya usaha seperti halnya nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Peran Usaha Mikro dalam Perekonomian

Usaha mikro memainkan peran penting dalam struktur perekonomian nasional maupun daerah, antara lain:

- a) Menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.
- b) Menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, terutama di pedesaan dan wilayah non-perkotaan.
- c) Menopang pertumbuhan ekonomi lokal melalui aktivitas usaha yang berbasis potensi daerah.
- d) Membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia. Usaha mikro menjadi fondasi dari pencapaian tersebut.

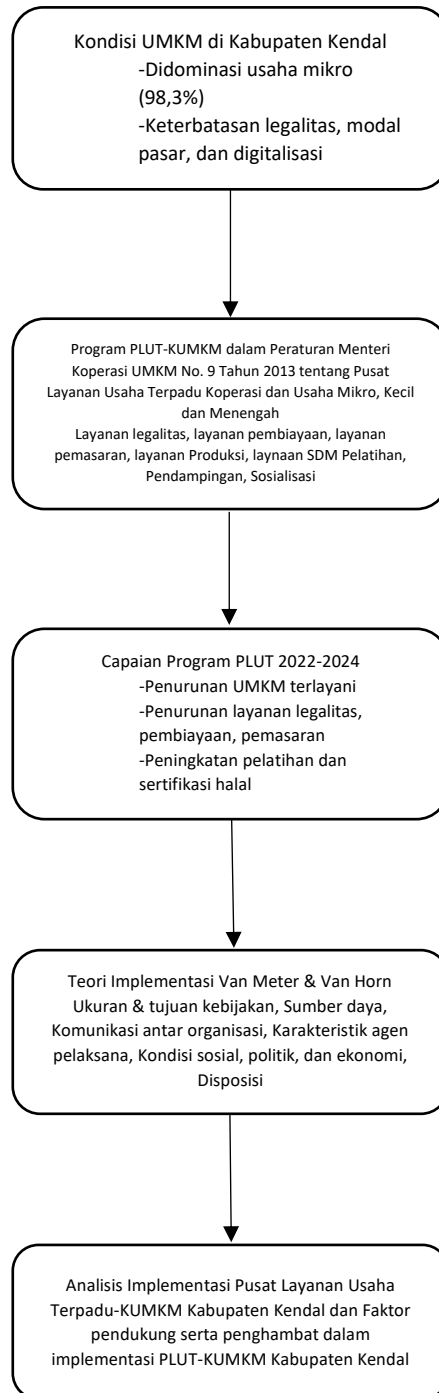
Permasalahan Umum yang Dihadapi Usaha Mikro

Meskipun berperan besar dalam ekonomi, usaha mikro menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat perkembangan usahanya:

- a) Keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal karena tidak memiliki agunan, laporan keuangan, atau legalitas usaha.
- b) Rendahnya kualitas produk dan daya saing di pasar.
- c) Minimnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, baik dalam proses produksi maupun pemasaran.
- d) Terbatasnya informasi tentang pasar, regulasi, dan peluang pengembangan usaha.
- e) Rendahnya partisipasi dalam program pelatihan atau pendampingan usaha.

Permasalahan-permasalahan tersebut menghambat usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha kecil atau menengah.

1.7 Kerangka Pikir



Gambar 1.4. Kerangka Berpikir

1.8 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM (PLUT-KUMKM) bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal. Untuk memahami hal tersebut secara sistematis, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn (1975) sebagai kerangka analisis.

Sebelum menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi melalui variabel Van Metter dan Van Horn, penelitian ini terlebih dahulu menelaah sejauh mana implementasi program PLUT-KUMKM telah dijalankan berdasarkan capaian kinerjanya. Capaian kinerja yang dimaksud mencakup jumlah layanan yang telah diberikan, seperti fasilitasi legalitas usaha (NIB, PIRT, halal, merek), konsultasi usaha, pelatihan, serta pendampingan UMKM. Analisis ini dilakukan untuk melihat ketercapaian program secara nyata di lapangan dan menjadi dasar dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan.

Van Metter dan Van Horn mengidentifikasi enam variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi (sikap) pelaksana. Masing-masing variabel tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Merujuk pada kejelasan arah dan tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan, dalam hal ini program PLUT-KUMKM. Dalam konteks ini, penting untuk melihat apakah tujuan dari program telah diformulasikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pelaksana di lapangan. Keberadaan indikator keberhasilan yang konkret juga menjadi bagian penting dari variabel ini, karena akan menentukan arah pelaksanaan program serta menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi hasilnya.

b. Sumber Daya

berkaitan dengan kecukupan dan kualitas seluruh sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Ini mencakup jumlah dan kompetensi konsultan PLUT yang menjadi ujung tombak layanan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang konsultasi, peralatan digital, hingga akses informasi yang mendukung proses pendampingan. Selain itu, tersedianya anggaran operasional yang cukup juga menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran implementasi program.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Menyangkut bagaimana struktur organisasi dan kejelasan peran pelaksana dalam mengemban tugasnya. Dalam hal ini, perlu dilihat bagaimana struktur kelembagaan PLUT disusun, apakah sudah mendukung pelaksanaan program secara efektif. Selain itu, tugas dan fungsi masing-masing konsultan juga harus terdefinisi dengan jelas, serta dilengkapi dengan

kapasitas, kompetensi, dan pengalaman yang relevan agar dapat menjalankan program secara profesional.

d. Komunikasi Antarorganisasi

Menggambarkan sejauh mana koordinasi dan komunikasi berjalan antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, seperti antara PLUT, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, dan lembaga lainnya. Efektivitas komunikasi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara terpisah-pisah, serta untuk mencegah miskomunikasi dan tumpang tindih tugas yang dapat menghambat pencapaian tujuan.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Mengacu pada lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Partisipasi aktif dari pelaku usaha mikro, dukungan dari masyarakat, serta sikap pemerintah daerah terhadap program menjadi aspek penting dalam hal ini. Apabila lingkungan sosial tidak mendukung atau kebijakan daerah tidak sejalan, maka pelaksanaan program pun akan mengalami hambatan.

f. Disposisi Pelaksana

Berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana kebijakan dalam hal ini konsultan PLUT dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan nilai dan tujuan yang telah ditetapkan. Aspek ini mencakup pemahaman pelaksana terhadap substansi kebijakan,

kemauan untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, serta loyalitas terhadap visi dari program PLUT-KUMKM itu sendiri.

Tabel 1.4. Operasionalisasi Konsep

Fokus Penelitian	Variabel	Indikator	Penjelasan
Implementasi Program PLUT-KUMKM (Program Kerja)	- Jumlah layanan legalitas usaha (NIB, PIRT, Halal, Merek) - Jumlah kegiatan pendampingan dan konsultasi - Jumlah pelatihan / bimtek yang dilaksanakan - Jumlah sertifikasi / izin yang diterbitkan - Sebaran dan jangkauan layanan		Mengukur sejauh mana implementasi program PLUT-KUMKM dilakukan berdasarkan data kuantitatif aktivitas layanan dan hasil yang dicapai di lapangan.
Faktor-Faktor Implementasi (Van Meter & Van Horn)	Standar dan Sasaran Kebijakan	-Kejelasan tujuan program -Pemahaman pelaksana terhadap sasaran -Adanya indikator keberhasilan	Menilai sejauh mana kebijakan PLUT-KUMKM memiliki tujuan yang jelas dan dipahami oleh pelaksana sebagai pedoman pelaksanaan program.
	Sumber Daya	-Jumlah dan kualitas konsultan -Ketersediaan sarana dan prasarana - Dukungan anggaran	Mengukur kecukupan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program, baik manusia, fisik maupun finansial.

Fokus Penelitian	Variabel	Indikator	Penjelasan
	Karakteristik Agen Pelaksana	-Struktur organisasi PLUT -Tugas dan fungsi konsultan -Kapasitas dan pengalaman pelaksana	Menganalisis bagaimana struktur kelembagaan dan kualitas pelaksana mendukung keberhasilan program.
	Komunikasi Antarorganisasi	-Koordinasi PLUT dengan Disdagkop UKM -Komunikasi dengan instansi pendukung lainnya -Konsistensi informasi kebijakan	Menilai efektivitas komunikasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan, untuk mencegah tumpang tindih dan miskomunikasi.
	Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik	-Partisipasi pelaku usaha mikro -Dukungan masyarakat dan lingkungan sekitar -Respons pemerintah daerah	Menelaah sejauh mana faktor eksternal seperti dukungan sosial dan kebijakan lokal memengaruhi kelancaran implementasi program.

Fokus Penelitian	Variabel	Indikator	Penjelasan
	Disposisi Pelaksana	-Komitmen pelaksana di lapangan -Pemahaman nilai dan tujuan kebijakan -Kemauan untuk menjalankan kebijakan	Mengkaji sikap dan kesungguhan pelaksana (seperti konsultan PLUT) dalam menerapkan kebijakan sesuai dengan nilai dan tujuan yang diharapkan.

Sumber : Diolah Peneliti

1.9 Argumen Penelitian

Argumen penelitian memuat jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang tersedia yang mana sesuai dengan teori yang tersedia pada literatur serta dibangun berdasarkan kerangka pikiran teoritis. Kaitan atau hubungan dengan penelitian ini yaitu, kebijakan publik belum tentu bisa mengatasi segala permasalahan yang ada dan kemungkinan menghasilkan permasalahan baru akibat beberapa indikator kebijakan yang belum tepat sasaran seperti halnya di Kabupaten Kendal. Pelaksanaan Pusat Usaha Layanan Terpadu (PLUT) bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal masih terdapat kendala. Permasalahan atau hambatan yang ada yaitu akibat lemahnya sumber daya khususnya pelaku usaha dalam jiwa kewirausahaannya, Komunikasi, kondisi sosial, politik dan ekonomi, standar sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana serta pada disposisi.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk melihat permasalahan pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) terhadap usaha mikro di Kabupaten Kendal. Adapun strategi dalam pendekatan kualitatif adalah deskriptif, karena peneliti akan menjelaskan mengenai bagaimana komunikasi pada implementasi pusat layanan usaha terpadu melalui sosialisasi program terhadap kelompok sasaran tersebut telah berjalan sesuai dengan maksud, tujuan, serta sasaran yang sudah ditentukan oleh pihak dinas koperasi dan PLUT sebelumnya.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian atau lokasi penelitian dalam penelitian ini yang dilaksanakan pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) terhadap usaha mikro di Kabupaten Kendal dilakukan di Kabupaten Kendal.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan orang-orang terkait dengan pusat layanan usaha terpadu bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal. Informan pertama adalah Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kendal, namun tidak menutup kemungkinan akan berkembang ke informan lainnya sesuai dengan rekomendasi informan sebelumnya menggunakan teknik *snowball sampling*. Untuk kriteria pelaku usaha mikro yang akan menjadi subjek penelitian hanya para usaha mikro yang terdaftar di PLUT-KUMKM Kendal serta memiliki produk usaha mikro yang telah terdaftar nomor usahanya atau memiliki legalitas.

1.10.4 Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data penelitian kualitatif yang mana data-data yang digunakan akan dalam bentuk kata secara verbal dan bukan dalam bentuk angka. Data primer didapatkan dengan melalui wawancara kepada narasumber atau informan, sedangkan pada data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui penelitian sebelumnya, Pusat Statistik, dan Dinas Koperasi UMKM.

1.10.5 Sumber Data

1. Data Primer

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data berupa data primer yang diambil melalui subjek langsung yaitu Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kendal, PLUT-KUMKM Kabupaten Kendal, pelaku usaha mikro Kabupaten Kendal.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi data penunjang berupa laporan tertulis, artikel, hasil publikasi, penelitian sebelumnya, serta *e-book* sebagai informasi atau data pendukung sumber pada penelitian ini.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pemerolehan pengumpulan data pada penelitian “Implementasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) bagi usaha mikro di Kabupaten Kendal” dalam proses pengumpulan data dilakukan melalui metode:

1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk kegiatan tanya jawab secara langsung dengan maksud tertentu serta menerapkan format tanya jawab yang telah terencana. Teknik dalam wawancara pada penelitian ini yaitu wawancara terstruktur. Sumber informasi selama pelaksanaan wawancara penelitian ini yaitu Kepala divisi program dan pengembangan bagian pemberdayaan dan pelatihan UMKM Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kendal, staff Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Kendal, dan Pelaku Usaha Mikro Kendal

2. Observasi

Observasi merupakan tindakan dimana penulis menjalankan aktivitas berupa pengamatan langsung terhadap objek apa yang akan diteliti mengenai Pusat Layanan usaha Terpadu (PLUT) terhadap usaha mikro Kendal.

3. Dokumentasi

Teknik ini yaitu dengan pengumpulan data ataupun dokumen yang mana data tersebut berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dibahas. Dokumentasi juga sebagai penunjang hasil akhir atau kesimpulan untuk menyempurnakan kekurangan yang ada dari hasil wawancara dan observasi.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan suatu usaha menorganisasikan data, memilih yang kemudian menjadikan satuan unit yang nantinya dapat diproses, menemukan pola-pola, kemudian mendapatkan hal penting untuk dipelajari serta untuk diputuskan

mengenai suatu hal yang mana nantinya dapat diceritakan kepada orang-orang lain. Peneliti menerapkan metode deskriptif kualitatif dalam proses menganalisa data penelitian yaitu dengan menggambarkan atau mendefinisikan teori dengan kondisi objektif yang pasti ditemui ketika di lapangan mengenai Implementasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kemudian melakukan langkah-langkah pada tahapan selanjutnya yaitu dengan mengumpulkan data yang diperlukan peneliti, setelah itu data-data tersebut digolongkan menurut jenisnya. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis melalui proses kualitatif dengan menguraikan dan memberikan penjelasan atau pemaparan yang mendukung. Kemudian hasil analisis dapat ditarik hasilnya atau kesimpulannya yang mana menjadi hasil akhir dari penelitian.

1.10.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan uji kualitas data dengan teknik triangulasi. Triangulasi untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber serta triangulasi teknik antara lain sebagai berikut :

1. Meninjau dengan membandingkan antara data dari hasil wawancara dengan narasumber dengan data hasil observasi pada lokasi penelitian.
2. Meninjau dengan membandingkan mengenai perihal apa saja yang dikatakan dari informan secara pribadi dengan perihal apa saja yang dikatakan dari informan di depan umum.
3. Meninjau dengan membandingkan perspektif dengan pandangan berbagai kalangan yaitu pihak pelaku usaha mikro yang terlibat, pihak Pusat Layanan Usaha Terpadu, dan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Kendal.

4. Meninjau dengan membandingkan hasil dari wawancara informan dengan bahasan pada arsip yang berhubungan.